

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, pelayanan kesehatan tidak lagi berrpusat pada rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut, melainkan harus diselenggarakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis pasien, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ini, penekanan pelayanan ditujukan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertam, yang berperan krusial dalam menyediakan layanan kesehatan dasar untuk masyarakat. FKTP memberikan layanan perorangan bersifat non-spesialistik seperti observasi, diagnosis, perawatan, pengObatan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Dalam praktiknya, FKTP ini umumnya merujuk pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) (Widjanarko, 2015).

Puskesmas adalah lembaga pelayanan kesehatan yang berada di garis depan denga tujuan utama sebagai tempat pengembangan layanan kesehatan. Tugasnya meliputi melakukan pembinaan serta memberikan layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah tertentu. Layanan kesehatan yang diberikan secara menyeluruh mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Sianturi, 2018).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian tergolong dalam dua jenis kategori meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan juga BMHP serta analisis dan layanan resep, penyediaan informasi mengenai obat, serta pemantauan efek samping obat. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, bersama dengan pengkajian dan pelayanan resep, penyediaan informasi obat, serta pemantauan efek samping obat di puskesmas, merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan (Permenkes RI, 2020).

Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas merupakan bagian integral dari pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat dan BMHP yang bermutu, aman, dan tepat guna dalam mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengajuan permintaan, penerimaan barang, penyimpanan, distribusi, penarikan maupun pemusnahan, pengendalian, pencatatan serta pelaporan, hingga pemantauan maupun evaluasi, yang semuanya harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional. Pelaksanaan pengelolaan yang sistematis dan terkoordinasi ini berperan penting dalam mencegah kesalahan, memastikan efisiensi penggunaan obat dan BMHP, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan capaian kinerja pelayanan farmasi di puskesmas.

Distribusi obat dan BMHP di puskesmas merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan sediaan farmasi, yang mencakup

penyaluran ke puskesmas pembantu, polindes, layanan keliling, dan posyandu dengan menggunakan format LP-LPO. Format ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga menjadi indikator kinerja distribusi obat di puskesmas, mencakup data seperti nama, satuan, kemasan, stok awal, penerimaan, persediaan, pemakaian, stok optimum yang ditentukan oleh gudang farmasi kabupaten, permintaan, serta jumlah pemberian obat. LP-LPO menjadi acuan dalam menentukan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan pelayanan di berbagai unit, serta mendukung tercapainya pengelolaan obat yang efisien, efektif, dan berkelanjutan dalam rangka menjamin pelayanan farmasi yang optimal (Pratama, 2024).

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian sesuai permenkes Nomor 26 tahun 2020, proses penerimaan obat dilaksanakan secara sistematis oleh penanggung jawab ruang farmasi atau kepala gudang obat puskesmas. Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif meliputi kesesuaian item, jumlah, kualitas, dan masa kadaluarsa berdasarkan LP-LPO.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bell, 2020) mengenai proses penerimaan obat di puskesmas dengan menggunakan LP-LPO di Puskesmas Penfui pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, kesesuaian antara permintaan dalam LP-LPO dan penerimaan hanya mencapai 79%, sementara 21% masih belum sesuai, dan berdasarkan hasil wawancara bersama apoteker di Puskesmas Penfui masih terdapat

ketidaksesuaian penerimaan dan permintaan obat sehingga kondisi ini menunjukkan pentingnya gambaran permintaan dan penerimaan obat dalam peningkatan sistem pengelolaan obat di puskesmas untuk memastikan ketersediaan obat yang optimal bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

Dari latar belakang diatas, peneliti berkeinginan untuk meneliti gambaran kesesuaian permintaan dan penerimaan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Penfui periode Januari-Februari 2025.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kesesuaian antara permintaan dan penerimaan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Punfui periode Januari-Februari 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui kesesuaian antara permintaan dan penerimaan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Penfui pada periode Januari-Februari 2025.

2. Tujuan khusus

Menganalisis kesesuaian antara permintaan dan penerimaan meliputi jumlah dan jenis obat serta jumlah dan jenis bahan medis habis pakai yang tersedia di Puskesmas pada periode Januari-Februari 2025

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang manajemen farmasi di puskesmas.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen farmasi, khususnya dalam konteks puskesmas.

3. Bagi masyarakat

Mengurangi risiko kekosongan, kekurangan, atau kelebihan obat dan bahan medis habis pakai yang dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan.